



LAPORAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA

I. UMUM

Tanggal Pendirian Kantor

Kantor LBH Papua adalah bagian dari salah 1 (satu) cabang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. LBH Papua sendiri didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 05/Skep/YLBHI/VII/1986 tertanggal 11 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh Bpk. T.Mulya Lubis, SH.LLM sebagai Ketua dan HJC.Princen sebagai Sekretaris. Dan pada tahun 1997 LBH Papua mendirikan 2 (dua) kantor LBH Pos, yakni Pos Merauke dan Pos Timika.

Jumlah Lawyers

Hingga kini LBH Papua mempunyai 4 orang Lawyers yang terbagi 2 orang di LBH Papua – Jayapura, 1 orang di LBH Pos Merauke dan 1 orang di LBH Pos Timika.

Pola Kerja

Hingga saat ini jumlah tenaga kerja pada LBH Papua berjumlah 14 orang yang bekerja secara full dan 2 orang yang bekerja secara part time. Mereka yang bekerja secara part time ini adalah sebagai purna bakti dan relawan program.

Status Bangunan Kantor

Bangunan yang dipakai untuk Kantor LBH Papua adalah merupakan bangunan sewaan dari Kantor Keuskupan Jayapura. Penggunaan gedung ini bersifat sewaan dalam masa 1 tahun dan nanti akan diperpakang lagi jika dibutuhkan.

Program Kaderisasi staff dan Karyawan.

Secara terencana dan jelas dalam program kantor tidak begitu nampak. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan berbagai hal. Namun pola kaderisasi yang digunakan adalah memberikan kesempatan kepada para staff dan karyawan/i untuk mengikuti tawaran-tawaran kegiatan yang ada baik dalam bentuk pelatihan, kursus dan mengikuti seleksi ke-S2.

Renstra Atau Program/Rencana Tahunan

Semenjak YLBHI mengalami berbagai kesulitan yang ada, juga secara langsung telah mempengaruhi LBH Papua, sehingga terhitung mulai saat itu hingga sekarang ini LBH Papua belum membuat Renstra atau Perencanaan Program tahunan.

II. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan

Sumber dana yang kini dikelola oleh LBH Papua berasal dari 2 lembaga, yakni: Yayasan TIFA untuk membiayai Program Kerja tentang Access to Justice dan Partnership untuk mendukung Program Pementauan kerja Polisi.

Sumber dari Sektor swasta.

Hingga saat ini tidak ada dukungan dana dari sektor swasta, meskipun ada beberapa tawaran dari BP Tangguh (Proyek Gas di Bintuni).

Sumber Dana Penanganan Kasus.

Untuk dana Penanganan kasus dapat kami peroleh dari biaya pendaftaran kasus dan beberapa sumbangan dari klien.

Pendanaan PEMDA

Juga belum ada dukungan dana dari PEMDA hingga saat ini.

III. PROGRAM

Jumlah Kasus yang Ditangani

Meskipun LBH Papua mengalami berbagai kesulitan, lebih-lebih di bidang finansial, namun permintaan bantuan hukum terus masuk. Jika melihat pada tahun 2004 tercatat ada 82 kasus dan untuk tahun 2005 tercatat LBH Papua menangani 40 kasus.

Jenis Kasus Yang Ditangani

Adapun jenis kasus yang ditangani adalah :

Perdata : Tanah, Perceraian, Perbuatan Melawan Hukum, Perburuhan,
Pidana : Makar(Politik), Pembunuhan, Penganiayaan, Pencurian.
Lain-lain : Gugatan PILKADA, Class Action PEMILU

Pola Penanganan

Dalam penanganan kasus-kasus diatas, dilakukan dengan cara/pola : Advokasi, Pendampingan, Pengorganisasian dan Perundingan.

Advokasi Kebijakan.

LBH Papua dalam kurun waktu belakangan ini hanya mengadvokasi 2 Kebijakan, yakni menyangkut Kebijakan di Bidang Kehutanan kaitan dengan Hak Masyarakat adat dan Masalah Majelis Rakyat Papua (MPR).

Mitra Civil Society.

Yang menjadi mitra dalam melakukan advokasi adalah : LSM dan Mahasiswa dan masyarakat adat. Mitra ini adalah untuk jaringan advokasi.

IV. PROGRAM KHUSUS

Program khusus yang kini dilakukan adalah mengupayakan kinerja Polisi dalam melakukan tugas-tugasnya di masyarakat. Sementara untuk Pengadilan masih bersifat membuat pengaduan-pengaduan terhadap hakim-hakim nakal.

Menyangkut Gerakan Korupsi pun belum dilakukan secara maksimal, karena baru sampai terlibat ditahapan diskusi-diskusi saja.

V. JARINGAN INTERNASIONAL

Keikutsertaan Jaringan Internasional

LBH Papua untuk kerja-kerja membangun jaringan Internasional tidak berjalan sama sekali

Pengiriman Staff ke luar negeri.

Hingga sekarang pula belum pernah ada Direktur maupun Staff LBH Papua yang dikirim keluar negeri.